

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

**Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya  
Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

**AGITA KARTIKA AYUNINGTYAS**

**NPM. 0771010129**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA**

**2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya  
Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009

Disusun Oleh :

**AGITA KARTIKA AYUNINGTYAS**

**NPM. 0771010129**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Subani, SH, M.Si.**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**

**Yana Indawati, SH, M.Kn**  
**NPT. 3 7901 07 0224**

Mengetahui,  
**D E K A N**

**Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

## **HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009

Oleh :

**AGITA KARTIKA AYUNINGTYAS**

**NPM. 0771010129**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur  
Pada tanggal 31 Desember 2010**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. **Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM**

**NIP. 19620625 199103 1 001**

(.....)

2. **H.Sutrisno, S.H.,M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1 001**

(.....)

3. **Subani, SH, M.Si**

**NIP. 19510504 198303 1 001**

(.....)

Mengetahui,

**D E K A N**

**Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM**

**NIP. 19620625 199103 1 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya  
Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009

Oleh :

**AGITA KARTIKA AYUNINGTYAS**  
**NPM. 0771010129**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 03 Januari 2010**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. **Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

(.....)

2. **H.Sutrisno, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

(.....)

3. **Subani, SH, M.Si**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**

(.....)

Mengetahui,  
**D E K A N**

**Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Agita Kartika Ayuningtyas
Tempat/Tgl lahir	: Jakarta, 02 Agustus 1987
NPM	: 0771010129
Konsentrasi	: Pidana
Alamat	: Dukuh Kupang XVII/1 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
KaProgdi

Surabaya, 20 Desember 2010  
Penulis,

(Subani SH, M.Si)

Agita Kartika Ayuningtyas  
NPM. 0771010129

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu organisasi yang berdasarkan aturan dan menyertakan emblem emblem ‘militer’ selama ini dipandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian besar masyarakat. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.

Hal seperti ini disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar, semisal humas untuk memberikan penjelasan kepada publik, atau setidaknya pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara, tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian, padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginyapun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara

pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya : menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (*insubordinasi*), dan desersi.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan diatas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinasny dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan. Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Suatu syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturan-peraturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer didalam daerah tertentu ancaman hukumannya dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan, karena militer adalah induk sebagian kecil dari anggota masyarakat yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan lain dalam Peradilan tersendiri yakni peradilan ketentaraan atau Peradilan Militer.

Seiring cepatnya laju perkembangan informasi di masyarakat, muncul tantangan terhadap peradilan militer, terutama pengadilan militer, untuk dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat akan keterbukaan informasi di Pengadilan Militer tanpa menanggalkan asas-asas dasar militer. Hal inilah yang tengah diupayakan oleh Pengadilan Militer agar dapat memenuhi rasa kepercayaan masyarakat, terutama setelah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Sejarah peradilan militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yang secara administrasi keuangan dan



kepegawaian di bawah Departemen Pertahanan, sementara secara pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi: badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjadikan lembaga-lembaga peradilan berada di bawah Mahkamah Agung baik secara kelembagaan maupun secara administrasi (kecuali Peradilan Agama yang pada waktu itu masih berada di Departemen Agama). Perubahan ini ditengarai oleh semangat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dan sejak bulan Agustus tahun 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan kebijakan satu atap (*one roof system*) sejak amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU kekuasaan Kehakiman), tidak mengubah ketentuan apa pun mengenai sistem satu atap dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam hal ini peradilan umum, dengan beberapa peradilan khusus dibawahnya, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Maka, Peradilan Militer merupakan salah satu (sub sistem) dari Peradilan Negara (sistem Peradilan Indonesia) yang ditentukan oleh Undang-undang dan mempunyai kedudukan yang sederajat dan setingkat dengan lingkungan Peradilan lainnya.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (TNI) merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Setiap Negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan professional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakan kedaulatan, melindungi warga negaranya dan menjadi perekat persatuan bangsa. Masa-masa era kemerdekaan TNI dan Polri terstruktur dalam lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut ABRI) selama sekitar 40 tahun. Polri menjadi bagian integral ABRI dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang Pertahanan Keamanan Negara. Namun, tekanan dan tuntutan global atas hak-hak asasi manusia dan demokrasi di bumi pertiwi Indonesia memuncak pada tahun 1998 dengan bergantinya kekuasaan Pemerintah Orde Baru, rakyat menghendaki perubahan yaitu memisahkan anggota Polri dari ABRI dan Peradilan Militer.

Pasal 1 ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang kedudukan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu TNI sebagai alat negara bertugas dibidang pertahanan

Negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), dan Polri sebagai alat negara yang tugasnya lebih berorientasi kepada penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Terpisahnya Polri dari TNI (dulu ABRI) akan membawa implikasi hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu tidak lagi diadili di Peradilan Militer, tetapi Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No.VII/MPR/2000, yaitu bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dan TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 8 Januari 2002, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, anggota Polri bukan lagi Prajurit TNI tetapi sebagai Pegawai Negeri sehingga pelanggaran tindak pidana yang dilakukan anggota Polri menjadi yuridiksi Peradilan Umum (Pasal 29 ayat 1 UU No.2/2002). Tindak pidana yang dilakukan anggota Polri setelah 8 Januari 2002 sudah tidak diadili lagi oleh Peradilan Militer di seluruh Indonesia, karena Oditur Militer tidak menyerahkan/melanjutkan perkara ke Pengadilan Militer, tetapi mengembalikan berkas perkara ke penyidik Polisi Militer untuk selanjutnya dikembalikan ke Provos Polri.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang

dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai peradilan khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan Negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya. Oleh karena itu Peradilan Militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan diawasi oleh Mabes TNI/Dephamkam tetapi berpuncak di Mahkamah Agung. Dalam hal beracara di Peradilan Militer di atur dengan ketentuan khusus yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Militer). Untuk itu kepada setiap anggota TNI dituntut tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, agar dapat mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan pada setiap prajurit TNI dalam sapta marga dan sumpah prajurit yang bunyinya:

#### SAPTA MARGA

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.

2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideology Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keprerwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menempati janji serta Sumpah Prajurit.

#### SUMPAH PRAJURIT

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus,

dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur militer atau Jaksa Militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Oditur yang ditunjuk dalam mengadili anggota TNI setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas perkara tersebut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka Oditur militer akan mengolah berkas perkara dengan membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) yang berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur tentang tindak

pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan kemudian Kepala Oditur Militer membuat SPH (Saran Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada Papera (Perwira penyerah Perkara) yang isinya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Bapat dan SPH dikirimkan ke Papera dengan dilampiri Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tandatangan ke Papera. Setelah menerima Skeppera Oditur Militer membuat Surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, tanggal, waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus terdakwa dinyatakan bersalah serta perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap oditur segera melaksanakan eksekusi kepada terdakwa untuk melaksanakan pidana.

Perkara Desersi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Miiter III-12 Surabaya dari data yang ada di Laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2001 terjadi 197 kasus desersi, tahun 2002 sampai dengan triwulan 3 (Juli s/d September 2010) kasus desersi meningkat menjadi 489 kasus.<sup>1</sup>

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan

---

<sup>1</sup> Diperoleh dari : Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya

pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer.

Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit yang dapat mengurangi kesiapsiagaannya di kesatuan dimana perbuatan tidak masuk dinas tersebut dapat merusak citra TNI di tengah masyarakat yang selama ini Prajurit TNI terkenal dengan disiplin dan loyalitas yang tinggi baik didalam kesatuan maupun diluar kesatuan. Melihat semakin banyaknya pelanggaran desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI menarik perhatian penulis mengadakan penelitian yang berfokus pada “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Desersi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana desersi dalam perkara Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009?
2. Bagaimana upaya pelaku tindak pidana desersi dalam perkara Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009 agar bisa kembali ke kesatuan (tidak diberhentikan dari dinas kemiliteran)?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui upaya anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak diberhentikan dari dinas kemiliterannya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis :**

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan militer khususnya tentang adanya pertanggungjawaban pidana kepada militer yang melakukan tindak pidana desersi yang merupakan pelanggaran disiplin militer.
- b. Dengan mengetahui adanya pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana desersi maka diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama oleh militer dan dapat meningkatkan penegakan kedisiplinan militer, sehingga dapat memperbaiki nama baik kemiliteran baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan yang akhirnya juga memperbaiki nama bangsa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai referensi kepada peneliti lainnya yang berminat pada penelitian yang sama.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

#### a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yaitu suatu tindakan pada Tempat, Waktu dan Keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, Bersifat Melawan Hukum, serta dengan Kesalahan, dilakukan oleh Seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>2</sup>

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya:

Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" daripada kata "tindak pidana". Menurut beliau kata "tindak pidana" dikenal karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu "perbuatan pidana". Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Vos hanya memberikan perumusan yang sangat singkat mengenai tindakan perbuatan pidana. Menurut beliau bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Perumusan peristiwa pidana menurut Prof. Simons adalah "*Een strafbaargelesetelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handelling van een teorekeningvatbar person*". Adapun maksud dari perumusan tersebut adalah salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Perumusan simons tersebut menunjukan unsur-unsur peristiwa pidana diantaranya *handeling* (perbuatan manusia) dimana perbuatan manusia tidak hanya *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een natalen* atau *niet doen* (melakukan atau tidak berbuat).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 198, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, h. 56

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>4</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, h.37.

## **b) Macam-Macam Tindak Pidana**

### **1. Tindak Pidana Umum**

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria, Pembagian ini berhubungan erat dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana.<sup>5</sup> Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke-II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam buku ke-III.<sup>6</sup>

#### **(a) Kejahatan :**

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan di antaranya: Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang.

Menurut B. Simandjutak, kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tercela yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut J. E Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro, kategorisasi tentang perbuatan sebagai suatu kejahatan (sesuatu

---

<sup>5</sup> S.R. Siantury, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, h.228 (selanjutnya disebut S.R.Siantury I)

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 230

yang dilekati sifat jahat) sesungguhnya merupakan suatu hal yang bersifat subyektif, historis dan partikular.

Secara empiris definisi kejahatan bisa dilihat dari dua perspektif , yaitu :

- Kejahatan dalam prespektif yuridis adalah perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.
- Kejahatan dalam prespektif sosiologis, merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat yang disebabkan perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.<sup>7</sup> Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat, yang artinya adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Contoh :

- a. Tindak pidana Pencurian Pasal 362 KUHP
- b. Tindak pidana Pembunuhan pasal 338 KUHP.

Maksudnya : Seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Padahal diketahuinya perbuatan tersebut adalah suatu

---

<sup>7</sup> Eko Wahyudi, *Handout presentasi Kejahatan Ekonomi*, Surabaya, 2009, h.1

kejahatan yang merugikan orang lain sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(b) Pelanggaran Hukum

Pada aspek kriminologis, pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.

Contoh :

- a. Tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan Pasal 522 KUHP.
- b. Tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan Pasal 531 KUHP.

## 2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari:

(1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*) :

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

Contoh :

- a. Tindak pidana desersi Pasal 87 KUHPM.
- b. Tindak pidana *insubordinasi* Pasal 105-109 KUHPM.

Maksudya: Seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya/ komandan. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik/isyarat.<sup>8</sup>

c. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan Pasal 118 KUHPM.

Maksudya: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.<sup>9</sup>

(2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*):

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Contoh :

a. Pencurian perlengkapan Militer. Pasal 140-143 KUHPM.

Maksudya : Kasus pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-

---

<sup>8</sup> S.R. Siantury, 1985. *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM PTHM, h.337 (selanjutnya disebut S.R.Siantury II)

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Prastiti Siswahyani, SH selaku Hakim Anggota di Pengadilan Militer III III-12 Surabaya, Tanggal 26 Oktober 2010

ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.<sup>10</sup>

b. Penadahan Militer. Pasal 145-146 KUHPM.

Maksudnya : Militer yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ketamakannya menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan satu benda itu diperoleh dari salah satu kejahatan.

Jadi walaupun di dalam KUHP sudah diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur dalam KUHPM secara khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

### **1.5.2 Tindak Pidana Desersi**

#### **a. Pengertian Desersi**

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.<sup>11</sup> Istilah Desersi, terdapat dalam KUHPM, BAB III Tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Sugiarto, SH selaku Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Tanggal 26 Oktober 2010

<sup>11</sup> Kamus istilah Militer. [http : www.Googlesearch.Com](http://www.Googlesearch.Com). Diakses tanggal 5 Agustus 2010 Pukul 11.22.46

Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas.

#### **b. Tindak Pidana Desersi**

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan atau kejahatannya tersebut diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ayat 1: Diancam karena desersi, militer :

- ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam pasal 85 nomor 2.

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya seorang Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke musuh atau dalam keadaan



damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat ia harus berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila dicermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali ketempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit terkandung kehendak bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer.

### **c. Bentuk-bentuk Desersi**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu:

a. Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan antara lain :

1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi.

Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi.

2. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.  
Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.
3. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.  
Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
4. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing.  
Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

b. Bentuk desersi karena waktu, yaitu :

1. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 hari waktu damai, contoh : seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.
2. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari empat hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang berperang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.

Jika ketidakhadiran dengan sah dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa ijin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Adapun yang dimaksud tidak hadir tanpa ijin selama satu hari disini adalah selama 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>12</sup>

Terhadap Prajurit TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat dengan UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI). Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit.

Pelanggaran disiplin prajurit sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya:

---

<sup>12</sup> Pernyataan Bapak Sugiato, selaku Hakim Militer III-12 Surabaya. Tanggal 16 Agustus 2010

terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti *push up* dan lari keliling lapangan.

Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), perkara sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa

diselesaikan melalui saluran hukum disiplin Prajurit dan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat didalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok penjara sampai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sedangkan bagi prajurit TNI yang terlibat masalah perdata (baik sebagai Tergugat maupun penggugat) maka untuk penyelesaian melalui pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan apabila yang dihadapi adalah masalah yang ada hubungan dengan perceraian maupun waris menurut hukum islam maka penyelesaian melalui peradilan Agama. mengenai gugatan tata usaha Militer, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Militer maka sesuai dengan hukum acara Tata Usaha Militer Bab V Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) Gugatan diajukan, ke Pengadilan Militer Tinggi. Namun sampai saat ini Peradilan Tata Usaha Militer belum terwujud, karena belum ada Peraturan pemerintahnya, sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 353 dijelaskan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini maka harus ada Peraturan pemerintahnya.

#### **d. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi adalah :**

Melihat pada ketentuan Pasal 87 KUHPM yang berbunyi :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mulyono, 2007, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jakarta

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Berdasarkan pada pengertian Pasal diatas, maka ada 5 (lima)

unsur Tindak Pidana Desersi, yaitu :

- Unsur ke-1: Militer
- Unsur ke-2: Dengan Sengaja
- Unsur ke-3: Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke-4: Dalam masa damai
- Unsur ke-5: Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut :

Unsur ke-1 “ Militer ”

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (Milwa).
- Baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini terdakwa sebagai anggota militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
- Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Unsur ke-2 “ Dengan Sengaja ”

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan Sengaja atau Kesengajaan” di sesuaikan dengan perkembangan dan

kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Unsur ke-3 “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

- Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

Unsur ke-4 “ Dalam waktu damai ”

- Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Unsur ke-5 “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

**e. Faktor-faktor yang Menyebabkan Adanya Tindak Pidana**

**Desersi**

Berdasar pada penelitian yang telah penulis lakukan, mendapatkan keterangan bahwa tindakan desersi itu dilakukan oleh anggota militer TNI yang dipacu oleh beberapa faktor. Yang mana faktor penyebabnya pasti tidak tunggal, selalu ada motif-motif yang bersifat pribadi, dan juga karena pengaruh lingkungan. Hasil laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerangkan bahwa seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi disebabkan oleh faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).

Faktor internal biasanya bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi seorang prajurit, masuk TNI karena memenuhi keinginan orangtua, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit bisa juga menjadi pemicu, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, yang dalam kenyataannya ternyata tak seindah yang dibayangkan sebelumnya.

Sedangkan faktor eksternal disini dikarenakan karena lingkungan. Gangguan lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi prajurit itu melelahkan, sementara imbalan ekonominya terbatas. Maka, kadangkala beberapa oknum terlibat dalam tindak kriminal, seperti banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya. Itu tentu kejadian yang sangat memprihatinkan, tetapi sekaligus tantangan untuk meminimalkannya. Masalah tersebut bukan hanya mencoreng pribadi, tetapi juga menodai kebanggaan korps. Sepanjang yang kita tahu, sikap tegas selalu dikedepankan oleh TNI untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum.



### 1.5.3 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Militer

#### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Militer

Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu/idiot*), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam.
2. Dengan perkataan lain bahwa subjek dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya : dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Pengertian pertanggungjawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bisa disimpulkan dengan mengkaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggung jawaban militer adalah kemampuan bertanggung jawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>14</sup> Sianturi I, *op.cit*, h. 249

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakat militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pembedaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.

Hal seperti itu perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekat pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.<sup>15</sup>

Secara umum tanggungjawab baru akan timbul apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau badan. Sama halnya dengan aturan hukum pidana, seseorang baru akan dituntut pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan atau perbuatan yang ditimbulkan. Lebih lanjut dalam menjelaskan kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Setiap militer yang melakukan tindak

---

<sup>15</sup> Sianturi II, *op.cit*, h.69

pidana militer murni khususnya desersi dianggap mampu bertanggungjawab apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim tidak menghadirkan saksi ahli untuk tindak pidana desersi kecuali tindak pidana militer campuran seperti pembunuhan.

Anggota militer dalam tindak pidana desersi dapat dipidana jika perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana desersi dan telah terbukti bersalah, dimana anggota militer tersebut yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari dan dalam waktu perang lebih dari empat hari. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggungjawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal. Oleh Majelis Hakim tentang adanya kemampuan bertanggung jawab militer dalam tindak pidana desersi menimbang bahwa anggota militer mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena militer yang bersalah maka ia harus dihukum.

**b. Dasar Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Militer.**

Pertanggungjawaban pidana militer bentuknya adalah dengan menerima segala pembedaan yang telah diberikan kepada pelaku.

Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM dan Pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk seluruh militer/TNI baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.

Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar Pengadilan, misalnya: datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi.

Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan diatas dapat dimintai bentuk

pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam Pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa :

- a. teguran
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
- c. penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

➤ Pidana Pokok :

- a. Pidana Mati

Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

- b. Pidana Penjara, ancaman hukumnya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya

bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

- c. Pidana Kurungan, ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.
- d. Pidana Tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan.

➤ Pidana Tambahan :

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan

setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

- (1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pension hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pension yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

b. Penurunan pangkat

Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira

c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP.

Ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP.

Ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata; adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.

Ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum  
ad. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politi yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.

#### 1.5.4 Tinjauan tentang Upaya Hukum

##### a. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum ialah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan Hakim.<sup>16</sup> Jadi maksud dari upaya hukum itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh hakim,

---

<sup>16</sup> Moch.Faisal Salam, 2004, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, h.241.



upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan jika ia menghendakinya. Hakim tidak dapat memaksa atau menghalanginya.

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Dalam HAPMIL dibedakan antara upaya hukum biasa dan luar biasa, yaitu :

1. Upaya hukum biasa

a. Permintaan pemeriksaan tingkat banding diatur dalam Pasal 219-230 HAPMIL.

b. Pemeriksaan tingkat kasasi yang diatur dalam Pasal 231-244 HAPMIL.

2. Upaya hukum luar biasa

a. Pemeriksaan tingkat Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 245-247 HAPMIL

b. Pemeriksaan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diatur dalam Pasal 248-253 HAPMIL.

**b. Pengertian Bantuan Hukum**

Masyarakat dan praktisi hukum belum mengenal istilah dan pengertian bantuan hukum, yang mereka kenal ialah advokat,

pengacara atau pembela yang jam bicaranya harus dibayar oleh orang yang memerlukan jasa dan bantuannya, sifatnya lebih mirip bisnis dan komersial. Itu sebabnya bantuan jasa hukum yang diberikan advokat, pengacara atau pembela merupakan hal yang hanya dapat dijangkau oleh orang yang berduit, bagi yang tidak berduit tidak mungkin didampingi pembela atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiannya. Bantuan hukum berarti jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompeten dan menguasai hukum, baik diluar maupun didalam proses pengadilan kepada klien yang terlibat suatu perkara, baik yang berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, korban atau saksi. Bantuan hukum ini merupakan salah satu perwujudan dari pada jaminan dan perlindungan hak azasi manusia khususnya para pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara Tersangka atau Terdakwa oleh Penasihat hukumnya.

Seperti yang diungkapkan di atas, istilah bantuan hukum boleh dikatakan masih merupakan hal yang baru bagi Bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara kita pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia Barat pengertian bantuan hukum

mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, seperti yang dilihat di bawah ini :

- a. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:
  - pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan dengan cuma-cuma.
  - bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Dengan demikian motivasi utama *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

- a. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas daripada *legal aid*. Karena bantuan *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan : baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

- b. Bentuk ketiga adalah *legal service*, dalam bahasa Indonesia, *legal service* dapat kita terjemahkan dengan perkataan “pelayanan hukum”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan: Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.<sup>17</sup>

Demikianlah pengertian bantuan hukum yang dijumpai dalam praktek di beberapa negara, di Indonesia dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut. Tetapi pada ketentuan KUHAP telah diatur dalam Pasal 54 yang bunyinya: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta Sinar Grafika, h.344

berhak memperoleh bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Jadi seseorang yang terkena kasus pidana berhak mendapat bantuan hukum.

#### **1.5.5 Peran Penasehat Hukum dalam Tindak Pidana Desersi**

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum yang biasa disebut sebagai pengacara atau advokat. Definisi advokat dalam *Black's Law Dictionary* adalah seseorang yang membantu, membela atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 KUHAP, Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk mendampingi dalam persidangan. Dan kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan juga apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak.

Pemberian bantuan hukum dan nasehat hukum kepada anggota TNI adalah atas perintah dan seijin Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang diatur dalam ketentuan Pasal 215 sampai dengan Pasal 218 UU Peradilan Militer yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 215 :

- (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.
- (3) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 216 :

- (1) Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.
- (2) Penasihat hukum, yang mendampingi terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus seizin kepala pengadilan.

Pasal 217 :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma atau *pro deo*
- (3) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 218 :

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan perkaranya dengan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penasihat hukum yang terbukti menyalahgunakan haknya, dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik oditur atau petugas Rumah Tahanan Militer memberikan peringatan kepadanya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilanggar, hubungan selanjutnya dilarang.

Apabila anggota TNI menggunakan bantuan hukum dari

Penasihat hukum dari luar dinas, maka Penasihat hukum tersebut

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ijin dari papera, dan sedapat mungkin bagi prajurit TNI yang terlibat masalah hukum bantuan hukum diutamakan dari dinas hukum angkatan. Terhadap perkara desersi meskipun perkaranya mudah pembuktian tidak menutup kemungkinan terhadap terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat hukum. Tetapi dalam kenyataannya tindak pidana desersi jarang sekali didampingi Penasihat hukum, hal itu disebabkan karena seorang militer menganggap dirinya memang bersalah melakukan perbuatan tersebut dan menerima hukuman atas putusan hakim.

Sesuai dengan Pasal 215 Ayat (1) UU Peradilan Militer menyatakan untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum disemua tingkat pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka peran penasihat hukum di sini adalah untuk membela hak-hak Terdakwa baik dalam tingkat pemeriksaan di penyidikan maupun di persidangan. Di dalam Persidangan peran penasihat hukum adalah mendampingi Terdakwa dalam hal mengajukan ekspesi atau keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer atau Jaksa Militer, mengajukan pledoi atau pembelaan atas tuntutan Oditur, mengajukan duplik atas replik Oditur dan hak-hak lain terdakwa misalnya mengajukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim.

Sehingga dalam proses persidangan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana desersi yang didampingi oleh Penasihat

hukum bisa membantu untuk membela hak-hak terdakwa disemua tingkat pemeriksaan, karena setiap orang yang diperiksa di Pengadilan belum tentu bersalah sebelum ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap Terdakwa tindak pidana desersi yang tidak didampingi Penasihat hukum di dalam pemeriksaan di Persidangan perlakuan yang diperoleh sama dengan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum, termasuk hak-hak yang didapatkan juga sama.

Dalam proses persidangan Majelis hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana desersi minimal dengan dua alat bukti serta ditambah dengan keyakinan hakim, yaitu apabila terdakwa di pemeriksaan persidangan terbukti bersalah tetap dinyatakan bersalah dan apabila tidak bersalah Hakim tetap menyatakan dia tidak bersalah dan diputus bebas. Namun demikian terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum apabila putusan majelis hakim yang dijatuhkan dirasa terlalu berat, maka terdakwa dalam mengajukan upaya hukum biasa (banding atau kasasi) tidak bisa secara maksimal dalam mengajukan memori banding atau kasasi, karena terdakwa tidak mengerti hukum.

#### **1.5.6 Teori Pidana dan Sistem Pidana**

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah

pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana, yaitu :

a) Teori absolut (retributif);

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b) Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

c) Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter



teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- (1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
  - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
  - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/ Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

(2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang

terdiri dari “aturan umum” (*“general rules”*) dan “aturan khusus” (*“special rules”*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu memaparkan atau melukiskan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, terperinci, lengkap dan menyeluruh tentang *“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009)”*.<sup>19</sup> Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai ruang lingkup desersi dimaksudkan untuk dapat memperoleh pembahasan tentang pokok permasalahan yang ada di Pengadilan Militer mengenai desersi. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis.

---

<sup>18</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h.105

<sup>19</sup> *Ibid*, h.106

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang didukung data primer, yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dimana dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data sekunder yang dimaksud penulis diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah hukum yang sifatnya mengikat

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).
- c) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.

- a) Asas-Asas Hukum Pidana
- b) Hukum Pidana Militer di Indonesia
- c) Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia

d) Metode Penelitian Hukum

e) Unsur-Unsur Tindak Pidana

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

a) Kamus

b) Ensiklopedia.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara:

a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat obyek yang akan penulis teliti.<sup>20</sup>

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.

c. *Interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang dibidangnya, untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan

---

<sup>20</sup> Rini, Indrati, *Handout Metodologi Penelitian Hukum*, 2007

yang sedang penulis teliti, dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan melakukan wawancara kepada Hakim.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. dimana dalam menganalisis/ pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi kepustakaan ataupun melalui *cyber media*. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan dalam skripsi ini dibagi 4 (empat) bab pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis membagi kedalam 6 (enam) sub.bab pembahasan. Sub.bab pertama adalah Latar Belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub.bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi point-point perumusan

masalah dari uraian latar belakang, sub.bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi point tujuan dari penelitian, sub.bab keempat adalah manfaat penelitian, sub.bab kelima adalah kajian pustaka yang berisi teori-teori dan dasar hukum dari permasalahan yang diangkat, sub.bab keenam adalah metode penelitian.

Bab II : Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi (dalam Perkara Nomor : PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009). Dalam bab ini, terdiri dari 2 (dua) sub pokok bahasan. Sub.bab, pertama yaitu Identitas Perkara. Sub.bab pokok bahasan pertama yaitu Surat dakwaan Sub.bab pokok bahasan kedua yaitu, Pledoi. Sub. bab ketiga yaitu, Putusan. Sub.bab pokok bahasan keempat yaitu, pertimbangan dan Sub.pokok bahasan kedua, Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi dalam perkara Nomor : PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009 dengan tiga sub.bab, pertama yaitu Unsur-Unsur Tindak Pidana desersi, sub.bab kedua Bentuk Desersi, sub.bab ketiga Faktor-Faktor Pelaku melakukan Tindak Pidana Desersi.

Bab III : Upaya Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Desersi agar bisa kembali ke kesatuannya (dalam Perkara Nomor : PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009). Dalam bab ini, terdiri dari 2 (dua) sub pokok bahasan, pertama yaitu Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Desersi dengan 2 (dua) sub.bab, yaitu sub.bab pertama Hal-Hal yang Memberatkan Hukuman Tindak Pidana Desersi. Sub.bab kedua Hal-hal yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Desersi. Sub pokok bahasan kedua tentang Upaya Pelaku Tindak Pidana Desersi agar bisa

Kembali Ke Kesatuannya dalam perkara Nomor : PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009. Bab IV : Penutup. Bab ini, bab terakhir dari penulisan skripsi memuat kesimpulan dan saran yang ditarik dari permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.